

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY

(Studi di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)

I Nyoman Sutama¹, Fani Fatona², Nining Sudiyarti^{3*}

^{1,2,3}Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: niningsudiyarti04@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History	
Received: 12 Desember 2022	<i>The purpose of this study was to determine the level of financial performance based on the concept of Value For Money in the Taliwang District Office, West Sumbawa Regency. This type of research is descriptive quantitative, namely research that aims to provide an overview of phenomena or symptoms in society by using numbers. The type of data used is secondary data in the form of an annual report at the Taliwang District Office, West Sumbawa Regency. The analytical tool used in this study is the concept of value for money, including economic ratios, efficiency ratios and effectiveness ratios. The results of the study show that the financial performance of the Taliwang Sub-District Office of West Sumbawa Regency in 2020-2021 is in the criteria of being uneconomical with the achieved ratio level being above 105%, and inefficient with the achieved ratio level being above 100%. Meanwhile, the effectiveness criteria are in the effective category with a ratio between 90% -100%. Based on these results, it is necessary to review the budget used by carrying out a strict controlling system for the budget issued by budget users. The Taliwang sub-district office of West Sumbawa Regency as a budget user must use the budget as economically as possible, minimize waste and unproductive expenses such as purchasing employee computers that are damaged, because they can still be repaired, and use the budget as effectively as possible to achieve the goals set.</i>
Revised: 24 Desember 2022	
Published: 31 Desember 2022	
Keywords	
Value For Money; Economical; Efficiency; Effectiveness.	

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah daerah (Gubernur atau Bupati) adalah dengan melihat kinerja keuangan daerah melalui perhitungan dan analisis terhadap target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD), baik dari sisi *input, output, outcome, impact, dan benefit*. Permasalahan yang cenderung muncul dalam penilaian pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah saat ini adalah sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap APBD masih sering terjadi pemborosan dana (*mark up*), kebocoran dana publik/korupsi, dan program-program yang tidak layak secara ekonomis/*inefisiensi*. Padahal sistem anggaran kinerja mengharuskan melakukan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran secara tertib, taat pada aturan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (PP. No. 105 Tahun 2000).

Terdapat permasalahan pada aspek perencanaan dan pengelolaan APBD saat ini, maka implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 yang dijadikan standar untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pencapaian target dan realisasi dari program dan kebijakan baik dalam komponen pendapatan, komponen belanja, dan komponen pembiayaan menjadi lemah posisinya. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memerhatikan bagaimana proses penganggaran yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap penilaian, serta apakah pencapaian realisasi anggaran telah berlangsung secara ekonomis, efisien, dan efektif (Erawan, *et al*, 2018).

Dalam organisasi perlu dilakukan secara rutin penilaian/evaluasi kinerja. Penilaian kinerja menurut Mulyani, *et al.* (2018) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial. Menurut Sudaryo (2018), penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik seseorang pekerja mempekerjakan mereka ketika dibandingkan dengan satu set standar dan kriteria kemudian mengkomunikasikan. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah proses evaluasi secara periodik efektivitas berbagai aktivitas.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan public; menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input; alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2021).

Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan untuk penilaian kinerja tersebut, mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan anggaran adalah konsep *value for money*. *Value for money* (VFM) adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang tersedia untuk itu. *Value for Money* merupakan suatu konsep pengukuran kinerja sektor publik yang mengukur kinerja berdasarkan tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Wuwungan, *et al.*, 2019).

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa *output* yang berwujud (*tangible output*), tetapi kebanyakan juga bersifat *output* tidak berwujud (*intangible output*) (Perdana, *et al.*, 2020).

Jika dilihat secara mendalam sebenarnya konsep *value for money* bukan sesuatu yang baru, bahkan *value for money* merupakan salah satu prinsip penting dari anggaran kinerja dan *good governance*. Mahmudi (2019) mengemukakan bahwa dalam melakukan pengukuran *value for money* perlu adanya langkah-langkah pengukuran agar dapat mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan publik. Adapun langkah-langkah pengukuran *value for money* adalah sebagai berikut, yaitu: *pertama*, pengukuran ekonomi, yaitu pengukuran ekonomi yang hanya mempertimbangkan masukan (input) yang gunakan. *Kedua*, pengukuran efisiensi, yaitu pengukuran dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. *Ketiga*, pengukuran efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

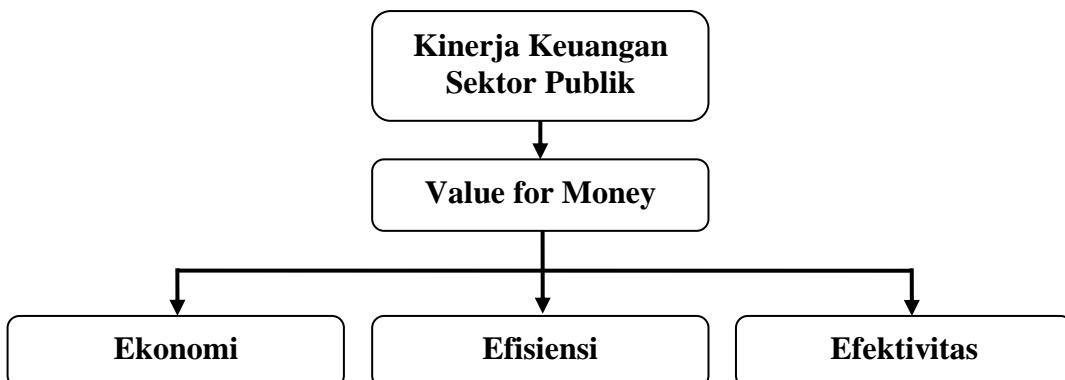
Kantor Kecamatan Taliwang sebagai salah satu unit pemerintahan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan unit paling dekat dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Namun begitu, image tentang rendahnya kinerja sektor publik termasuk kantor kecamatan pemerintah daerah tentu sudah tidak asing lagi. Selain kinerja yang rendah, diwarnai juga birokrasi yang sulit, berbelit-belit dan intrik praktik suap yang selalu mewarnai dan menjadikan citra aparatur di sektor publik semakin buruk.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan manajemen publik di Kantor Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Penulis ingin melihat penerapan konsep *value for money* di Kantor Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa dalam melakukan kegiatan organisasi, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena atau gejala di masyarakat (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji secara deskriptif bagaimana pengelolaan keuangan dan capaianya di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2020-2021. Adapun desain penelitian ini disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Desain Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung secara langsung (Sugiyono, 2017). Data kuantitatif pada penelitian ini berupa laporan tahunan di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2020-2021.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiantoro (2017), data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari laporan tahunan Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode atau teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Arikunto (2017), metode dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi pada penelitian ini diimplementasikan dengan cara pencatatan dokumen dan arsip laporan tahunan yang terdapat di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2021.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2021 menggunakan indikator *value for money*. Value for Money merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Dewi dan Suartana, 2018).

1. Rasio Ekonomis

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep *Value For Money* yaitu rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Rumus yang digunakan untuk menghitung dan kriteria untuk menilai rasio efisiensi adalah sebagai berikut (dalam Purwiyanti, 2017).

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Target (Belanja)}}{\text{Realisasi(Belanja)}} \times 100\%$$

Adapun Prosentase Kriteria Penilaian Rasio Ekonomis sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase Kriteria Kinerja Rasio Ekonomis

Persentase Rasio Ekonomi	Kriteria Rasio Ekonomis
< 90%	Sangat Ekonomis
90% - 94,99%	Ekonomis
95% - 100%	Cukup Ekonomis
100,01% - 105%	Kurang Ekonomis
> 105%	Tidak Ekonomis

Sumber : Kepmendagri (dalam Indrayani, 2018).

2. Rasio Efisiensi

Rumus yang digunakan untuk menghitung dan kriteria untuk menilai rasio efisiensi adalah sebagai berikut (Ridwan dan Anggrawati, 2017).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Target (Belanja)}}{\text{Realisasi(Pendapatan)}} \times 100\%$$

Adapun Prosentase Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase Kriteria Kinerja Rasio Efisiensi

Persentase Rasio Efisiensi	Kriteria Rasio Efisiensi
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri (dalam Indrayani dan Khairunnisa, 2018).

3. Rasio Efektivitas

Rumus yang digunakan untuk menghitung dan kriteria untuk menilai rasio efektivitas adalah sebagai berikut (Susanto, 2019).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Target (Pendapatan)}}{\text{Realisasi(Pendapatan)}} \times 100\%$$

Adapun Prosentase Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas sebagai berikut:

Tabel 3. Persentase Kriteria Kinerja Rasio Efektivitas

Persentase Rasio Efisiensi	Kriteria Rasio Efektivitas
100% ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri (dalam Indrayani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kantor pemerintahan dalam mengukur kinerja perspektif keuangan menggunakan tolak ukur kosep *value for money* yang terdiri dari 3E, yaitu rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

1. Rasio Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai rasio ekonomi pada Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Rasio Ekonomi Pada Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020

No	Keterangan (Kegiatan)	Target	Realisasi	Rasio Ekonomis	Kriteria
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	1.358.480.000	716.511.782	189,60 %	Tidak Ekonomis
2.	Belanja Gedung dan Bangunan	1.476.637.000	1.171.188.224	126,08 %	Tidak Ekonomis
3.	Belanja Modal	75.960.000	17.843.700	425,70 %	Tidak Ekonomis
Jumlah		2.911.077.000	1.905.543.706	152,77 %	Tidak Ekonomis

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Camat Taliwang Tahun 2019.

Berdasarkan tabel 4, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020 berada pada kategori tidak ekonomis. Hal itu disebabkan ketidak tepatan dalam membuat perencanaan kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah sehingga realisasi anggaran berada dibawah angka target yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Rasio Ekonomi Pada Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021

No	Keterangan (Kegiatan)	Target	Realisasi	Rasio Ekonomis	Kriteria
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	2.149.200.000	2.027.800.793	105,99 %	Tidak Ekonomis
2.	Belanja Gedung dan Bangunan	3.201.840.000	3.011.974.884	106,30 %	Tidak Ekonomis
3.	Belanja Modal	1.920.535.000	1.856.119.881	103,47 %	Kurang Ekonomis
Jumlah		7.271.575.000	6.895.895.558	105,45 %	Tidak Ekonomis

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Camat Taliwang Tahun 2020.

Tabel 5 menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021 berada pada kategori tidak ekonomis. Dengan demikian, secara keseluruhan kinerja keuangan Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2021 berada pada kategori tidak ekonomis sehingga diperlukan upaya dari pemerintah untuk melakukan kajian dan review ulang terkait

dengan anggaran sehingga relisasi penggunaan anggaran tidak melebihi dari target yang telah direncanakan.

2. Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai rasio efisiensi pada Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Rasio Efisiensi pada Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2021

Keterangan	Belanja Target	Pendapatan Realisasi	Rasio Efisiensi	Kriteria
Tahun 2020	43.596.000.000	37.665.785.590	115,74 %	Tidak Efisien
Tahun 2021	47.250.000.000	50.748.633.806	93,11 %	Kurang Efisien
Jumlah	90.846.000.000	88.414.419.396	102,75 %	Tidak Efisien
Rata-rata	45.423.000.000	44.207.209.698	102,75 %	Tidak Efisien

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Camat Taliwang Tahun 2019 dan 2020.

Berdasarkan tabel 6, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2021 berada pada kategori tidak efisien. Hal itu dapat dilihat dari target masing-masing belanja lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan masing-masing kegiatan yang dilakukan selama tahun 2020-2021. Diperlukan upaya dari pemerintah untuk melakukan pengkajian lebih dalam terkait anggaran sehingga relisasi penggunaan anggaran tidak melebihi dari target pendapatan yang telah direncanakan sehingga tidak terjadi pemborosan dan kebocoran pada anggaran di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai rasio efektivitas Pada Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Rasio Efektivitas pada Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2021

Keterangan	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kriteria
Tahun 2020	37.665.785.590	43.596.000.000	86,40%	Cukup Efektif
Tahun 2021	50.748.633.806	47.250.000.000	107,40%	Sangat Efektif
Jumlah	88.414.419.396	90.846.000.000	97,32%	Efektif
Rata-rata	44.207.209.698	45.423.000.000	97,32%	Efektif

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Camat Taliwang Tahun 20191 dan 2020.

Berdasarkan tabel 7, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2021 berada pada kategori efektif. Hal itu dapat dilihat dari realisasi pendapatan di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2020-2021 lebih besar dibandingkan target pendapatan yang telah ditetapkan. Pemerintah harus meningkatkan upayanya dalam menggali berbagai sumber pendapatan potensial untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat membiayai sendiri jalannya pemerintahan

Prosentase dan kriteria rasio ekonomi pada Tahun 2020 meliputi belanja peralatan dan mesin sebesar 189,60% (tidak ekonomis), belanja gedung dan bangunan sebesar 126,08% (tidak ekonomis) dan belanja modal sebesar 425,70% (tidak ekonomis),

sedangkan persentase dan kriteria rasio ekonomi pada Tahun 2021, meliputi belanja peralatan dan mesin sebesar 105,99% (tidak ekonomis), belanja gedung dan bangunan sebesar 106,30% (tidak ekonomis) dan belanja modal sebesar 103,47% (tidak ekonomis). Dengan melihat tabel rasio ekonomi pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa capaian prosentase selama 2 tahun tersebut pada tingkat rasio ekonomi tergolong pada kriteria tidak ekonomis.

Prosentase dan kriteria rasio efisiensi pada tahun 2020 sebesar 115,74% (tidak efisien) dan tahun 2021 sebesar 93,11% (kurang efisien). Perbandingan prosentase rasio efisiensi selama 2 tahun tersebut terjadi perubahan. Hal itu disebabkan karena terjadinya peningkatan pada belanja barang dan jasa, belanja gedung dan bangunan serta belanja modal, peningkatan pada belanja-belanja tersebut terlihat pada sisi realisasi yang lebih besar dari target (yang direncanakan). Dengan demikian dapat disimpulkan capaian rata-rata selama 2 tahun tersebut mencapai kriteria tidak efisien dengan angka sebesar 102,75%.

Prosentase dan kriteria rasio efektivitas pada tahun 2020 sebesar 86,40%, tergolong dengan kriteria (cukup efektif), sedangkan pada tahun 2021 sebesar 107,40% dengan kriteria (sangat efektif). Capaian rata-rata rasio efektivitas pada tahun 2020 dan tahun 2021 tergolong efektif yaitu sebesar 97,32%. Hal ini disebabkan karena peningkatan target dan relisasi pada tahun 2021 sehingga berjumlah Rp. 90.846.000.000, dengan rata-rata Rp. 45.423.000.000,-.

KESIMPULAN

Dengan menggunakan konsep *value for money* (3E), yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari segi rasio ekonomi, kinerja keuangan Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat berada pada kriteria tidak ekonomis dengan tingkat rasio yang dicapai berada diatas 105%, diperlukan upaya dari pemerintah untuk melakukan kajian dan review ulang terkait dengan anggaran relisasi yang tidak melebihi dari target yang telah direncanakan.
2. Dari segi rasio efisiensi, kinerja keuangan Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat berada pada kriteria tidak efisien dengan tingkat rasio yang dicapai berada diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidak efisienan belanja pemerintah dengan target dan relisasi pendapatan selama 2 tahun.
3. Pada tingkat rasio efektivitas target dan realisasi pendapatan pada Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020-2021 berada pada kriteria efektif, yaitu antara 90% -100%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020-2021 relisasi pendapatan yang dicapai tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran, yaitu perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap anggaran yang digunakan dengan melakukan sistem *controlling* yang ketat terhadap anggaran yang dikeluarkan yang dilakukan oleh pengguna anggaran. Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pengguna anggaran harus menggunakan anggaran belanjanya dengan seekonomis mungkin, meminimalisir pemborosan dan pengeluaran yang tidak produktif seperti pembelian komputer karyawan yang sudah rusak, karena masih bisa diperbaiki, dan seefektif mungkin menggunakan anggaran belanja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, I.A.D.K., & Suartana, I.W. (2018). Penilaian Kinerja Berbasis Value for Money dan Sistem Online Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 22(2): 1281-1307.
- Erawan, P.A., Santosa, S.W.A., Budiardha, D.K.B., & Wahyudi, I.P.T.A. (2018). Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8(3): 187-193.
- Indrayani, & Khairunnisa. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6(1): 1-10.
- Lembaga Administrasi Negara. (2000). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YPKN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyani, S., Suzan, L., Dagara, Y., & Alam, M. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi: Aplikasi di Sektor Publik*. Bandung: Unpad Press.
- Perdama, T.A., Budiantoro, R.A., & Putra, F.I.F.S. (2020). Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis Value for Money. *Jurnal Inovasi*, Vol. 16(2): 339-346.
- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *e Jurnal Katalogis*, Vol. 5(3): 190-200.
- Ridwan, M., & Anggrawati (2017). Konsep Value for Money: Alternatif Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur. *ASSETS: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 7(1): 104-119.
- Sudaryo, Y. (2018). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*. Vol. 7(1): 81-92.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Wuwungan, G.T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). Penerapan Metode Value For Money sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan pada Organisasi Sektor Publik di Dinas Kesehatan Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 14(4): 354-361.